

SEBUAH KONTRIBUSI PEMIKIRAN: “EKOSISTEM KELAUTAN PONDASI UTAMA MENUJU KEPRI EMAS 2045”

POLICY BRIEF

Policy Brief ini dirumuskan dari hasil “Diskusi Publik” dengan Tema:

Sebuah Kontribusi Pemikiran: “Ekosistem Kelautan Pondasi Utama Menuju Kepri Emas 2045”

Tanjungpinang, 5 Mei 2026

Penulis :

Dr. Dony Apdillah, M.Si

Huzrin Hood, S.H., M.H., M.Pd.I

Dr. Said Sudrajat, S.Sos., M.Si

Osman Hasyim



Ringkasan Eksekutif

Potensi raksasa sumberdaya maritim Provinsi Kepulauan Riau yang terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan dan Selat Karimata diyakini mampu menjadi Kepri melangkah lebih cepat menuju Kepri EMAS 2045.

Terdapat Butir Rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu penguatan industrialisasi dan hilirisasi hasil sumberdaya laut melalui penetapan lokasi sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan.
2. Pentingnya integrasi ekonomi regional dengan memanfaatkan posisi geostrategis jalur Perdagangan Global.
3. Pengembangan teknologi *mariculture* berkelanjutan.
4. Implementasi nyata program ekonomi biru (*blue economy*).
5. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap lokasi dan pengelolaan sedimentasi laut yang telah ditetapkan di Perairan Kepulauan Riau.
6. Memanfaatkan momentum kebijakan nasional saat ini Pengembangan Kampung Nelayan Merh Putih (KNMP).

FIKP UMRAH

DKP Prov Kepri

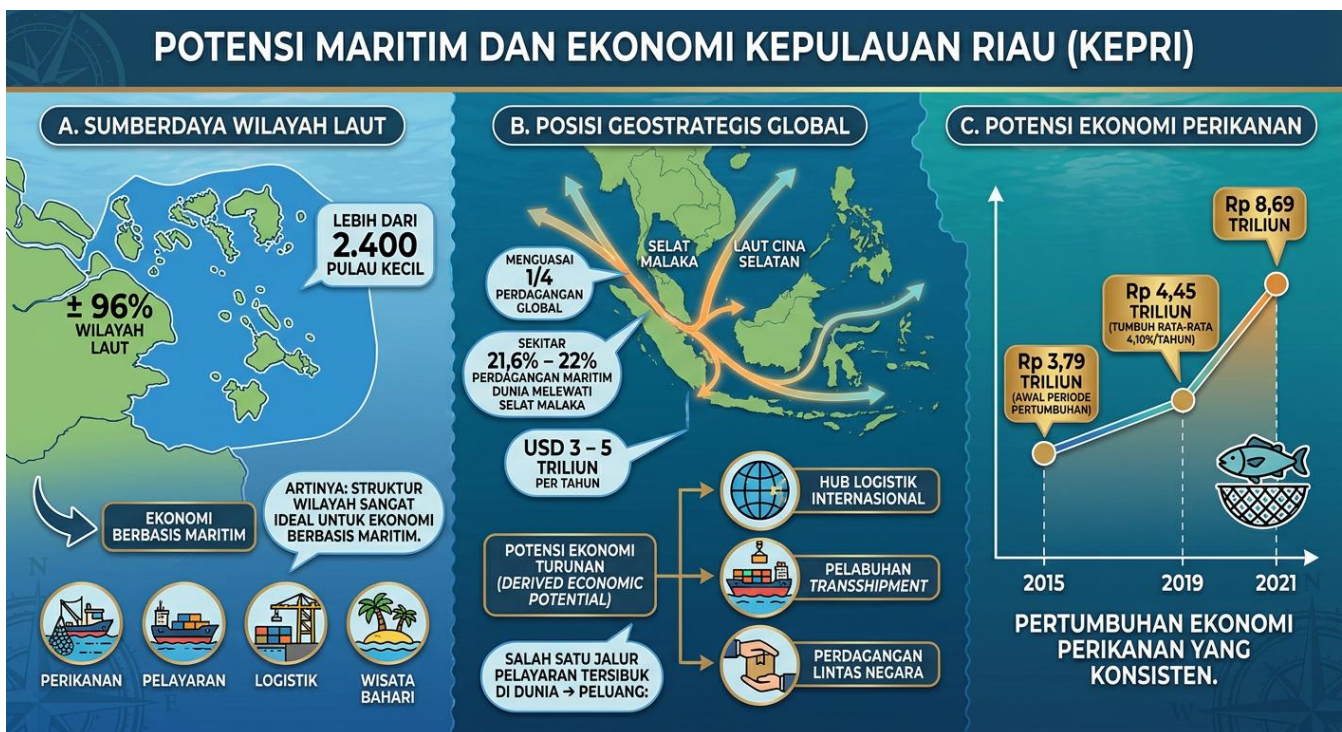
ALMI

LATAR BELAKANG

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan strategis di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah berbasis maritim. Secara geografis, Kepri berada pada jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Posisi ini menjadikan Kepri sebagai gerbang ekonomi nasional yang sangat potensial dalam sektor pelayaran, perdagangan, perikanan, pariwisata bahari, dan industri maritim.

Kepulauan Riau memiliki sekitar 2.408 pulau, dengan wilayah laut mencapai sekitar 98% dari total luas wilayah provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama pembangunan Kepri terletak pada sektor kelautan dan ekosistem maritim. Selain memiliki wilayah laut yang luas, Kepri juga berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Jalur ini dilalui ribuan kapal internasional setiap tahun dan menjadi pusat distribusi perdagangan global. Kedekatan wilayah Kepri dengan Singapura dan Malaysia turut memberikan keuntungan strategis bagi pengembangan kawasan industri, pelabuhan internasional, logistik, dan investasi maritim. Kondisi ini menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim nasional.

Potensi ekonomi maritim Kepri juga tercermin dari kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi laut, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan Batam misalnya, menjadi salah satu pusat industri galangan kapal terbesar di Indonesia dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang menarik investasi asing. Di sisi lain, wilayah Natuna dan Anambas memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap dan energi migas laut.



Namun demikian, pemanfaatan potensi maritim tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antar pulau, keterbatasan infrastruktur konektivitas laut, pencemaran lingkungan pesisir, serta ancaman kerusakan ekosistem laut akibat eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia maritim dan pemanfaatan teknologi kelautan juga masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat global.

Dalam mewujudkan visi “Kepri EMAS 2045” (Ekonomi Maju, Aman, dan Sejahtera), ekosistem maritim menjadi pondasi utama pembangunan daerah. Konsep pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy) perlu diperkuat melalui optimalisasi sektor perikanan berkelanjutan, pengembangan pelabuhan modern, industri maritim hijau, pariwisata bahari, serta konservasi wilayah pesisir dan laut. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, Kepri memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi maritim unggulan di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2045.

Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa ekosistem maritim bukan hanya identitas geografis bagi Kepulauan Riau, tetapi juga aset strategis yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan menuju Kepri EMAS 2045.

REKOMENDASI

Rekomendasi sejumlah butir pemikiran strategis sebagai arah pembangunan ekosistem maritim Kepulauan Riau menuju Kepri Emas 2045:



1. Perlu penguatan industrialisasi dan hilirisasi hasil sumberdaya laut melalui penetapan lokasi sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan.
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu tinggi dan berdaya saing.
2. Pentingnya integrasi ekonomi regional dengan memanfaatkan posisi geostrategis jalur Perdagangan Global.
Kepri berada langsung di koridor ekonomi perdagangan internasional: Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, menguasai 1/4 Perdagangan Global (21,6% – 22%), dengan estimasi potensi ekonomi USD 3 – 5 triliun per tahun, belum termasuk Potensi Ekonomi Turunan (Derived Economic Potential). Peluang utama bagi Kepri sebagai Hub logistik internasional; pelabuhan transshipment, perdagangan lintas negara.
3. Pengembangan teknologi *mariculture* berkelanjutan.
Teknologi maricultur akan mampu meningkatkan produksi sumberdaya laut secara konsisten untuk menopang pengembangan industri dan hilirisasi, melalui transformasi teknologi, seperti penerapan Internet of Things (IoT), digitalisasi data nelayan, penguatan ekosistem pendukung budidaya perikanan, termasuk pengembangan konsep *smart port*, selain itu kebutuhan akan kapal penjaga pantai (*coast guard*) juga menjadi perhatian untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan.
4. Implementasi nyata program ekonomi biru (*blue economy*).
Arahan strategi implementasi dapat dirancang secara realistis dan bertahap dalam empat fase. Fase pertama (2025–2030) difokuskan pada konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar. Fase kedua (2030–2035) diarahkan pada ekstensifikasi dan peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan. Fase ketiga (2035–2040) menekankan integrasi industrialisasi pada skala regional, sementara fase keempat (2040–2045) bertujuan untuk memantapkan posisi Kepulauan Riau dalam ekosistem global yang kompetitif dan berkelanjutan.
5. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap lokasi dan pengelolaan sedimentasi laut yang telah ditetapkan di Perairan Kepulauan Riau.
Guna memastikan program ekonomi biru dapat dilaksanakan tanpa benturan konflik dengan masyarakat dan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.
6. Memanfaatkan momentum kebijakan nasional saat ini Pengembangan Kampung Nelayan Merh Putih (KNMP).
KNMP seharusnya sebagai titik awal arah orientasi kebijakan industriliasi dan hilirisasi hasil perikanan, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas pesisir. transformasi destinasi wisata yang memiliki daya tarik khas, dengan mengusung konsep ekowisata unik dan tematik, destinasi ramah keluarga (*family-friendly*), serta pengembangan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Tantangan utama yang dihadapi saat ini untuk implementasi program kelautan dan perikanan adalah aksesibilitas rantai pasok komoditas menuju pulau-pulau kecil masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan konektivitas antar pulau melalui penyediaan moda transportasi yang lebih efisien, seperti pesawat amfibi (*seaplane*) dan kapal cepat (*speedboat*) difasilitasi pemerintah.